

BAB I PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara dua Negara berdaulat selalu memiliki dinamika, hal tersebut terjadi karena adanya perubahan rezim disalah satu Negara, pergeseran orientasi politik sebuah Negara, adanya ancaman keamanan nasional, maupun munculnya kekuatan baru dunia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kebijakan luar negeri. Dinamika hubungan bilateral inilah yang terjadi antara Filipina dan Amerika Serikat, sejatinya kedua Negara adalah sahabat karib karena faktor sejarah panjang yang membuat kedua Negara memiliki ikatan emosional dan Filipina merupakan Sekutu utama bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada era Pemerintahan Presiden Duterte, hubungan baik antara Filipina dan Amerika Serikat mengalami sedikit gangguan karena beberapa hal. Supaya lebih mudah untuk menganalisa penyebab terjadinya gangguan dalam hubungan Filipina dan Amerika Serikat di era Presiden Duterte, maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul **POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA TERHADAP AMERIKA SERIKAT DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE TAHUN 2016-2018**, skripsi ini akan membahas analisa terkait kebijakan-kebijakan luar negeri Filipina terhadap Amerika Serikat ditahun 2016-2018 yang menimbulkan dinamika didalamnya. Pada BAB I ini akan menjadi bagian awal dari penulisan skripsi ini, pada bagian ini akan berisikan latar belakang masalah yang sekaligus menjadi alasan utama dalam penulisan skripsi ini, lalu rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian dan jangkauan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 30 Juni 2016 Rodrigo Duterte resmi dilantik menjadi Presiden ke-16 Filipina untuk

menggantikan Presiden sebelumnya yaitu Benigno Aquino III. Presiden Duterte berhasil mengalahkan para pesaingnya berkat janji-janji populis yang disampaikannya pada saat kampanye, misalnya seperti berbagai program “Keras” untuk mengatasi angka kriminalitas yang tinggi di Filipina dengan cara mempraktikkan kembali hukuman mati, memerintahkan polisi lakukan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal dan memberikan hadiah untuk jasad pengedar narkoba. Bahkan, Duterte pernah mendorong warga sipil Filipina agar tak ragu untuk membunuh seorang pelaku kriminal¹.

Presiden Duterte ternyata tidak main-main dengan janjinya yang akan melakukan “Perang Melawan Narkoba”, untuk menyelesaikan permasalahan Narkoba ini Presiden Duterte memilih untuk menggunakan cara “Keras” yaitu dengan dilegalkannya penembakan atau pembunuhan terhadap pecandu maupun pengedar Narkoba tanpa melalui proses peradilan yang resmi. Presiden Duterte berjanji akan membunuh 100 ribu penjahat, sebagai bagian dari upayanya memberantas penyalahgunaan Narkoba di Filipina. Sejak dimulai dari Juli 2016 hingga September 2016, operasi ini telah memakan korban tewas lebih dari 3.300 terduga pengedar dan pengguna narkoba tewas, sebagian besar diduga karena praktik pembunuhan di luar hukum. Polisi mengklaim bahwa sekitar sepertiga dari jumlah tersebut tewas dalam adu tembak dengan polisi dalam operasi antinarkoba, sementara sisanya tewas karena perang antar-geng².

Dugaan pembunuhan di luar hukum yang

¹ KOMPAS. 2016. Rodrigo Duterte Resmi Dilantik Jadi Presiden Ke-16 Filipina. Juni 30. Accessed Desember 2, 2018. <https://internasional.kompas.com/read/2016/06/30/12364261/rodrigo.duterte.resmi.dilantik.jadi.president.ke-16.filipina>.

² Sari, Amanda Puspita. 2016. PBB Ingin Selidiki Pembunuhan dalam Perang Narkoba Duterte. September 26. Accessed Desember 3, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160926142720-106-161192/pbb-ingin-selidiki-pembunuhan-dalam-perang-narkoba-duterte>.

menyebabkan ribuan orang tewas ini memantik kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Amerika Serikat dan berbagai kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Namun, Presiden Duterte menegaskan bahwa Ia akan terus menumpas tersangka pengedar dan pemakai Narkoba hingga Filipina bersih dari Narkoba. Dalam pidato kepada para pejabat lokal dan eksekutif bisnis, Presiden Duterte menyampaikan kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak perlu khawatir terhadap taktik Filipina dalam memerangi perdagangan Narkoba. Dalam kesempatan lain Presiden Duterte memperingatkan lagi bahwa hubungan Filipina dengan Amerika Serikat akan terganggu jika mereka terus mendikte kebijakan domestik Filipina dan lebih suka untuk berhubungan dengan Rusia dan Tiongkok karena mereka lebih mengerti kebutuhan domestik Filipina. Presiden Duterte juga mengungkapkan bahwa jika Amerika Serikat menolak untuk menjual senjata ke Filipina, maka Filipina bisa saja untuk beralih menggunakan senjata impor dari Rusia dan Tiongkok³.

Presiden Duterte sempat mengumpat Presiden Obama dengan *Putang Ina* (anak pelacur), merespon hal tersebut juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Ned Price menyampaikan bahwa Presiden Obama tidak akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Duterte. Sebelumnya Presiden Obama dan Presiden Duterte direncanakan akan melakukan pertemuan bilateral pada Selasa 6 September 2016. Namun, Gedung Putih menyatakan Presiden Obama mengubah jadwal untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, saat menghadiri KTT ASEAN di ibukota Laos, Vientiane⁴.

³ BBC. 2016. Duterte kutuk lagi presiden AS: Pergilah ke neraka, Obama! Oktober 6. Accessed Desember 3, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161005_dunia_duterte_kutuk_obama.

⁴ BBC. 2016. Dikatai 'anak pelacur,' Presiden Obama batalkan pertemuan dengan Presiden Duterte. September 6. Accessed Desember 3, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160905_dunia_duterte_obama.

Saat kunjungan kenegaraan ke Jepang pada Oktober 2016, pada hari pertamanya di Jepang, Presiden Duterte kembali mengancam Amerika Serikat untuk mengakhiri perjanjian atau pakta pertahanan antara Filipina dan Amerika Serikat yang berlaku sejak tahun 2014. Di hadapan sekitar 1.200 warga Filipina di Tokyo, Presiden Duterte menyebutkan bahwa Amerika benar-benar pengganggu. Presiden Duterte menyebut ancaman Amerika Serikat untuk memotong bantuan ke Filipina adalah pernyataan merendahkan. Sebelum terbang ke Jepang, Presiden Duterte juga menyampaikan pidato di Bandara Manila, menyebut warga Amerika “bodoh” dan negara itu telah diserang dengan kefanatikan murni dan diskriminasi. Duterte menyebut bahwa Filipina bisa saja untuk mencabut pakta pertahanan yang mengizinkan sejumlah besar pasukan Amerika, kapal perang, dan pesawat-pesawatnya untuk menggelar latihan perang di wilayah Filipina⁵.

Sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte tersebut sangat berbanding terbalik dengan Presiden Filipina pendahulunya yaitu Benigno Aquino III, dimana ketika berkuasa dan menjabat sebagai Presiden Filipina Periode 2010-2016 Presiden Benigno Aquino berusaha menjaga baik hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Filipina merupakan mitra terdekat Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut tidak lepas dari faktor historis bahwa Filipina sebelum merdeka merupakan wilayah kolonial dari Amerika Serikat. Berdasarkan sejarah Filipina, negara ini pernah dibawah kekuasaan Amerika Serikat pada kurun waktu 1898-1946⁶.

Ketika dibawah Pemerintahan Presiden Benigno

⁵ Berita Satu. 2016. Di Jepang, Duterte Kembali Luapkan Amarah pada AS. Oktober 26. Accessed Desember 3, 2018. <http://sp.beritasatu.com/home/di-jepang-duterte-kembali-luapkan-amarah-pada-as/117305>.

⁶ Agoncillo, Teodoro Andal. 1990. "11. The Revolution Second Phase", History of the Filipino People (edisi ke-Eighth). Manila: University of the Philippines. Hal 187-192.

Aquino, Filipina dan Amerika Serikat meningkatkan kerjasama baik di bidang ekonomi, perdagangan, pertahanan dan juga keamanan regional. Hal tersebut dibuktikan dengan Filipina dan Amerika Serikat menandatangani Pakta Pertahanan baru pada 28 April 2014, Presiden Benigno Aquino menyampaikan bahwa kerjasama yang lebih luas antara Amerika dan Filipina akan memperkuat kemampuan mereka untuk berlatih dan beroperasi, serta memberikan reaksi yang lebih cepat terhadap sejumlah tantangan keamanan. Pakta pertahanan itu sendiri penting bagi Filipina yang kekuatan militernya dinilai lemah, serta terus di bawah tekanan China dalam konflik teritorial di perairan Laut China Selatan⁷.

Pada tahun 1947, Filipina dan Amerika Serikat menandatangani *Republic Philippines-United States Military Base Agreement (RP-US MBA)* yang mengatur tentang pangkalan militer Amerika Serikat, Clark dan Subic Bay di Filipina, serta *Republic Philippines-United States Military Assistance (RP-US MA)* yang mengatur pemberian bantuan militer oleh Amerika Serikat kepada Filipina untuk membantu pertahanan nasional Filipina dari ancaman keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian, tahun 1951 kedua Negara menandatangani *Mutual Defence Treaty (MDT)*, perjanjian ini mengatur dukungan satu sama lain jika terjadi serangan dari luar atas pihak lainnya. Lalu, tiga tahun setelahnya atau tepatnya pada tahun 1954, Filipina dan Amerika Serikat bersama-sama bergabung dengan *South East Asia Treaty Organization (SEATO)*, organisasi keamanan ini bertujuan untuk menangkal masuknya pengaruh ideologi Komunis di Asia Tenggara⁸.

⁷ Jemadu, Liberty. 2014. Filipina dan Amerika Serikat Tandatangani Pakta Pertahanan Baru. April 28. Accessed Desember 4, 2018. <https://www.suara.com/news/2014/04/28/151544/filipina-dan-amerika-serikat-tandatangani-pakta-pertahanan-baru>.

⁸ Hanifan, Aqwam Fiazmi. 2016. Filipina Bukan Apa-apa Tanpa Amerika. Desember 15. Accessed Juni 16, 2019. <https://tirto.id/filipina-bukan-apa-apa-tanpa-amerika-bKRo>.

Pada Desember tahun 2012, Asisten Menlu AS untuk wilayah Asia Pasifik, Kurt Campbell, Asisten Menhan AS bidang Keamanan Asia-Pasifik Mark Lippert, Dubes Filipina untuk AS Jose Cuisia, dan Pejabat Kemenlu Filipina Bidang Kebijakan Luar Negeri Erlinda Basilio melakukan pertemuan khusus yang menghasilkan sebuah rencana kerja yang akan membuka kerjasama yang lebih kuat dan erat antara kedua negara. Para pejabat mengatakan mereka sedang mengupayakan hubungan, pertahanan, kelautan, ekonomi, dan keterlibatan diplomatik yang lebih erat serta mendorong penegakan hukum. Kedua negara tersebut memiliki perjanjian pertahanan bersama selama lebih dari 50 tahun, di mana selalu ada kehadiran militer Amerika. Beberapa pangkalan militer Amerika di Filipina didirikan antara tahun 1898-1992. Sejak kedua negara menandatangani perjanjian kunjungan pasukan tahun 1999, terlihat lebih sering adanya kunjungan dan kehadiran militer Amerika Serikat di pelabuhan tersebut⁹.

Wakil Menteri Pertahanan Filipina saat itu, Piolo Lorenzo Batino, mengatakan kunjungan tersebut mencakup penambahan pelatihan dan latihan untuk pasukan militer Filipina. Latihan itu akan diarahkan pada keamanan maritim, penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan ini semakin dibutuhkan untuk memerinci konsep-konsep ini, guna meningkatkan kehadiran yang bergilir. Ini akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam hubungan kedua negara. Filipina mengatakan, mereka menghendaki posisi yang lebih baik untuk mempertahankan klaim di Laut Cina Selatan. Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei juga memperjuangkan klaimnya, sementara Tiongkok menyatakan hampir seluruh wilayah laut itu adalah milik

⁹ Matanasi, Petrik. 2016. Pangkalan Militer Amerika di Filipina. Juli 13. Accessed Juni 16, 2019. <https://tirto.id/pangkalan-militer-amerika-di-filipina-bsUH>.

Tiongkok¹⁰.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Filipina awal mengatakan, Filipina memandang Amerika sebagai pihak yang dapat membantu menempatkan Filipina dalam posisi yang lebih baik. Selagi Amerika Serikat mempertahankan posisi netralnya dalam sengketa teritorial, mereka menyerahkan konsultasi pertahanan kepada Filipina sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pertahanan Bersama. Asisten Departemen Luar Negeri Amerika Kurt Campbell yang menghadiri perundingan itu mengatakan hubungan kedua negara "mengalami kemajuan" dan memperkuat strategi, politik, ekonomi dan militer dalam beberapa tahun terakhir. Ia menekankan kedua negara perlu bekerja sama sebagai mitra yang setara¹¹.

Secara historis, hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina sangat kuat dan digambarkan sebagai sebuah hubungan khusus. Filipina adalah salah satu mitra Amerika Serikat yang tertua serta sekutu non-NATO utama dan strategis. Amerika Serikat secara konsisten disebut-sebut sebagai salah satu negara favoritnya Filipina, dengan 91 persen orang Filipina menyukai Amerika pada tahun 2002, 90 persen dari Filipina melihat pengaruh AS dengan positif pada tahun 2011. Bahkan tahun 2013, 85 persen orang Filipina menyukai orang-orang AS dan 92 persen orang Filipina memandang Amerika Serikat dengan baik di 2015, dan 89% memiliki kepercayaan pada presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pada tahun 2014, membuat Filipina menjadi negara paling pro-Amerika Serikat di dunia¹².

¹⁰ Atkinson, Garrett .2013 .Filipina bertekad lebih mengukuhkan hubungan dengan AS. Februari 13. Accessed Juni 16, 2019. <http://apdf-magazine.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/02/25/philippines-us-relations>

¹¹ Orendain, Simone. 2012. Filipina dan AS Pererat Hubungan Diplomatik dan Pertahanan. Desember 13. Accessed Juni 14, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/filipina-dan-as-pererat-hubungan-diplomatik-dan-pertahanan/1563872.html>.

¹² Global Indicators Database. 2014. Global Indicators Database. Accessed Juni 15, 2019. <https://www.pewresearch.org/global/database/>.

Ketika Amerika Serikat mengalami pergantian kekuasaan dari Presiden Barack Obama ke Presiden Donald Trump, terjadi sedikit perubahan dari sikap Presiden Duterte karena Ia berharap Presiden Trump akan memberikan sikap berbeda dan mendukung upayanya untuk perang melawan Narkoba di Filipina. Presiden Trump sendiri mengundang Presiden Duterte ke Gedung Putih pada 30 April 2017, undangan ini juga menunjukkan upaya dari Presiden Trump untuk mempertahankan hubungan baik kedua negara setelah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama tidak mendukung kebijakan perang Narkoba yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte¹³.

Hubungan yang terjalin erat Filipina dan Amerika Serikat sangat penting bagi kedua Negara. Hubungan erat kedua Negara yang memiliki ikatan historis panjang ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi kedua Negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan militer (keamanan). Sehingga penting bagi kedua Negara untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang terjadi antar kedua Negara, sehingga hubungan erat yang sudah terjalin selama ini dapat bertahan dan tetap memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional bagi kedua Negara. Hal tersebutlah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyebab-penyebab terjadinya kerenggangan hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat di era Presiden Duterte dan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan

¹³ TEMPO. 2017. Pertama Kali, Donald Trump Undang Duterte ke Gedung Putih. April 30. Accessed Desember 30, 2018. <https://dunia.tempo.co/read/870918/pertama-kali-donald-trump-undang-duterte-ke-gedung-putih/full&view=ok>.

dalam suatu pertanyaan sebagai berikut : **“Mengapa hubungan politik luar negeri Filipina dan Amerika Serikat mengalami kerenggangan di era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte tahun 2016-2018?”**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan kemudian menjawab pokok permasalahan maka dalam kerangka teori ini Penulis menggunakan **Teori Politik Luar Negeri** untuk menjabarkan secara terperinci tentang latar belakang dan penyebab terjadinya gejala hubungan politik luar negeri Filipina dan Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

1. Politik Luar Negeri

Definisi mengenai politik luar negeri dapat dimulai dengan pendapat para ahli, diantara lain seperti yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relations Dictionary* yang mengemukakan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah strategi atau tindakan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan terhadap negara atau entitas internasional lain¹⁴. Dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu berdasarkan kepentingan nasional negaranya. Selanjutnya definisi ini juga diikuti oleh pernyataan Robert Jackson & Georg Sorensen yang mengemukakan bahwa politik luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan yang ditujukan untuk memandu keputusan dan tindakan

¹⁴ Olton, Jack C Plano & Roy. 1969. *The International Relations Dictionary*. United States of America: Rinehart and Winston inc. Hal 73-75.

pemerintah terkait urusan eksternal, terutama dalam hubungannya dengan negara lain¹⁵.

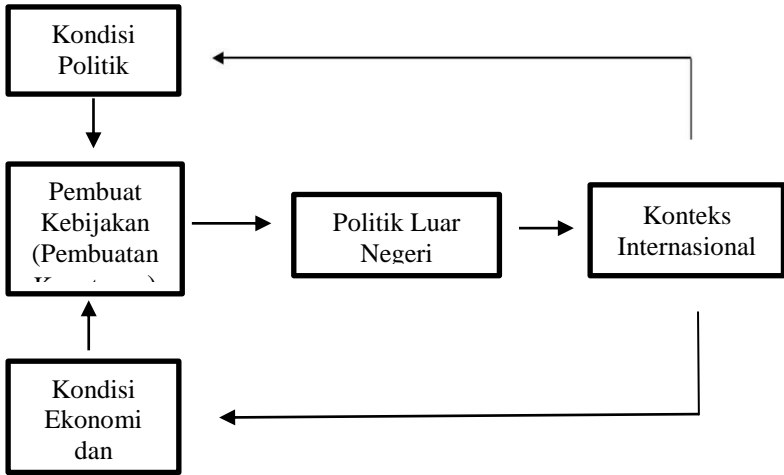
Di sisi lain menurut K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *International Politics* mengemukakan bahwa politik luar negeri terhadap hubungan negara merupakan hal yang penting dalam hubungan internasional, dalam bukunya pun dikemukakan tiga kriteria politik luar negeri: 1). Sejauh mana pembuat kebijakan melibatkan diri dan sumber daya negaranya untuk mencapai tujuan tertentu; 2). Unsur waktu yang ditentukan pada pencapaiannya; 3). Jenis tuntutan yang dirumuskan ke dalam tujuan terhadap negara lain¹⁶.

Pendapat dari para ahli tersebut disempurnakan oleh William D Coplin. Menurut Coplin politik luar negeri merupakan upaya suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, untuk itu terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui untuk memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu Politik luar negeri juga dianggap sebagai sebuah respon suatu negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Dalam proses pembuatannya tentu terdapat beberapa determinan yang melatar belakangi para pemimpin atau pembuat kebijakan membuat sebuah keputusan politik luar negeri. Untuk itu William D Coplin mengemukakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, seperti yang diilustrasikan ke dalam bagan di bawah ini :

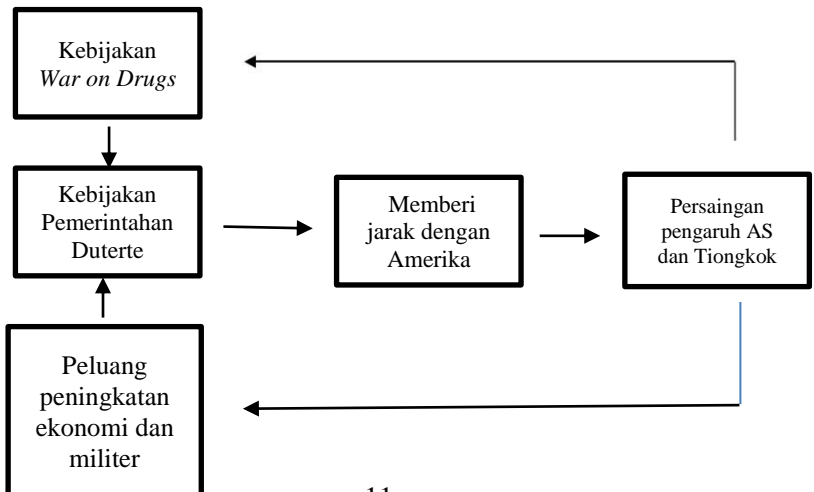
¹⁵ Sorensen, Robert Jackson & Georg. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional. New York: Pustaka Pelajar.

¹⁶ Holsti. 1983. *International Politics*. New Delhi: Prentice Hall of India PL.

Gambar 1
Teori Proses Pembuatan Keputusan Kebijakan Luar Negeri



Gambar 2
Proses Pembuatan Keputusan Kebijakan Luar Negeri Presiden Duterte



Pertama, kondisi ekonomi dan militer menurut Coplin kapasitas kekuatan ekonomi dan militer suatu negara dapat ditentukan sebagai instrument politik luar negeri kondisi ekonomi dan militer. Penilaian terhadap kondisi ekonomi suatu negara meliputi Analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara begitu juga dengan hubungannya terhadap perbandingan dengan kondisi ekonomi dari negara lain. Sementara itu kondisi kemampuan militer menjadi sebuah instrument yang memengaruhi pembuatan politik luar negeri suatu negara dengan menekankan pada aspek keamanan dan kemampuan militer suatu negara dalam melindungi teritori serta seluruh warga negara dari ancaman yang datang baik secara langsung maupun tidak langsung dari luar dan dalam negeri.

Dalam hal ini jika melihat dari bagan nomor dua determinan ekonomi dan militer pada masa Pemerintahan Presiden Duterte, adanya aktivitas militer Amerika Serikat di pangkalan Filipina untuk melaksanakan operasi navigasi di wilayah Laut China Selatan diyakini dapat melemahkan posisi Filipina untuk memenangkan arbitrase wilayah yang tengah dalam sengketa tersebut. Sementara itu adanya peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama ekonomi dengan Tiongkok membuat Presiden Duterte memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Tiongkok¹⁷.

Kedua, kondisi politik domestik, menurut Coplin untuk menentukan arah politik luar negeri suatu negara maka dapat diobservasi melalui situasi politik domestik dalam negara tersebut. Situasi

¹⁷ Chiang, Jeremy. 2017. "Philippine Foreign Policy in the 21st Century: the Influence of Double-Asymmetric Structure."

politik domestik meliputi faktor kultural maupun sistem politik negara dimana dalam hal ini sistem pemerintahan atau birokrasi suatu negara yang dibentuk oleh pemerintah dapat mempengaruhi praktik kebijakan luar negeri itu sendiri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya.

Pada masa pemerintahan Presiden Duterte didominasi oleh rasa nasionalisme dan identitas yang didasari pada sentiment imperialisme Amerika Serikat terhadap Filipina yang mendorong terjadinya kerenggangan hubungan antara kedua negara pada periode pemerintahan Presiden Duterte. Hal ini juga ditambah dengan respon negatif dari Amerika Serikat terhadap kebijakan *War on Drug* yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte membuat pandangannya terhadap Amerika Serikat semakin memburuk.

Ketiga, konteks internasional, menurut Coplin terdapat elemen-elemen yang dalam konteks internasional yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara yaitu meliputi geografis, ekonomi dan politik. Faktor geografis berhubungan dengan perdagangan internasional dan perilaku negara terhadap berbagai hubungan multikultural. Selain itu, keadaan politik internasional yang sedang berlangsung dalam jangka waktu tertentu secara langsung dapat mempengaruhi negara tersebut berperilaku¹⁸.

Jika melihat dari sisi konteks internasional pada masa kepemimpinan Presiden Duterte adanya momen kebangkitan ekonomi dan kekuatan militer

¹⁸ Coplin, William D. 1992. "Pengantar Politik Internasional. Suatu Telaah Teoritis, Edisi kedua." 30. Bandung: CV. Sinar Bandung. Accessed Februari 08, 2019. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-luar-negeri-foreign-policy/5593>.

Tiongkok membuat Presiden Duterte akhirnya mengarahkan politik luar negerinya terhadap Tiongkok dan melakukan normalisasi hubungan yang sempat mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya yaitu Presiden Aquino III. Lalu, sebagai gantinya pada masa administrasi Presiden Duterte hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat semakin merenggang diakibatkan perubahan arah politik luar negeri Filipina tersebut.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menarik argumentasi dari penelitian ini bahwa hubungan politik luar negeri Filipina dan Amerika Serikat mengalami kerenggangan di era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte tahun 2016-2018, karena :

- 1) Kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte dan diterapkan di Filipina dinilai oleh Amerika Serikat melanggar HAM, sehingga menyebabkan perbedaan pandangan antar kedua negara.
- 2) Kebangkitan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan militer membuat Presiden Duterte menggeser orientasi politik luar negeri Filipina kepada Tiongkok.

E. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Filipina terhadap Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.
- 2) Untuk mengetahui alasan terjadinya kerenggangan hubungan luar negeri Filipina dan Amerika Serikat di masa Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa dari data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya¹⁹.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder atau menggunakan studi pustaka (*Library Research*) dengan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu digambarkan secara sistematis. Penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang telah tersedia, dengan melakukan tela'ah pustaka pada sejumlah literatur, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, yaitu antara lain :

- a. Buku-buku
- b. Jurnal dan dokumen
- c. Majalah dan surat kabar
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*web site*)

3. Metode Analisa

Metode analisa dalam penulisan ini adalah

¹⁹ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang bersifat penjelasan secara nyata tentang penyebab terjadinya kerenggangan dalam hubungan Politik Luar Negeri Filipina dan Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte tahun 2016-2018²⁰.

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016 menjadi babak baru dalam hubungan luar negeri Filipina dan Amerika Serikat, sikap dan kebijakan Duterte yang kerap mengkritik Amerika Serikat dan adanya main mata dengan Tiongkok menyebabkan renggangnya hubungan Filipina dan Amerika Serikat yang dapat mengancam keharmonisan hubungan Filipina dan Amerika Serikat kedepannya.

²⁰ Symon, Catherine Cassel, and Gillian. 1994. *Qualitative Methods in Organizational Research*. London: Sage Publications.